



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik yang berisi tentang pengukuran tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah di dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana yang ditetapkan dalam INPRES No. 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang penulisannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2017. Kami sadar bahwa LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

Sumenep, Pebruari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP**



M. H. KARAWI, S.Sos, M.Si

Humas Utama Muda

NIP. 19581215 198003 1 015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EKSEKUTIF SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	4
1.4 Telaahan Visi, Misi dan program	7
1.5 Isu-isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	13
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	13
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	13
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	14
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	14
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	14
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	16
B. Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	23



EKSEKUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : Bidang Pembinaan ideology, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan hak asasi manusia, Bidang Pembinaan Kewaspadaan dan Bidang Pembinaan Politik dan organisasi kemasyarakatan pada kegiatan tahun 2017 melaksanakan 3 (tiga) sasaran dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah **100%** atau termasuk kategori “**SANGAT BERHASIL**”.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2017 berupa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung masing-masing sebesar Rp. 3.078.319.748,00 dan Rp. 2.370.699.035,00. Adapun realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 2.520.693.200,00 atau 94,20% dan Rp. 3.032.010.226,80 atau 97,87%.

No.	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%-tase
1.	Belanja Tidak Langsung	3.078.319.748,00	2.164.917.387,00	70,33%
2.	Belanja Langsung	2.370.699.035,00	2.043.011.524,00	86,18%
Jumlah		5.449.018.783,00	4.207.928.911,00	77,22%

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2017 berhasil melaksanakan 7 program dari 33 kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan tingkat capaian kerjanya **100%** atau termasuk “**SANGAT BERHASIL**”.

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat



keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun Anggaran 2016-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam proses penyusunan dokumen renstra, SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.



Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahunan maupun lima tahunan dan dalam penyusunannya diperlukan sumber-sumber yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan



teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman dan arahan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan amanah visi, misi dan/atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.

1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
2. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai alat pengukuran kinerja SKPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan

1.3. Gambaran Umum Organisasi

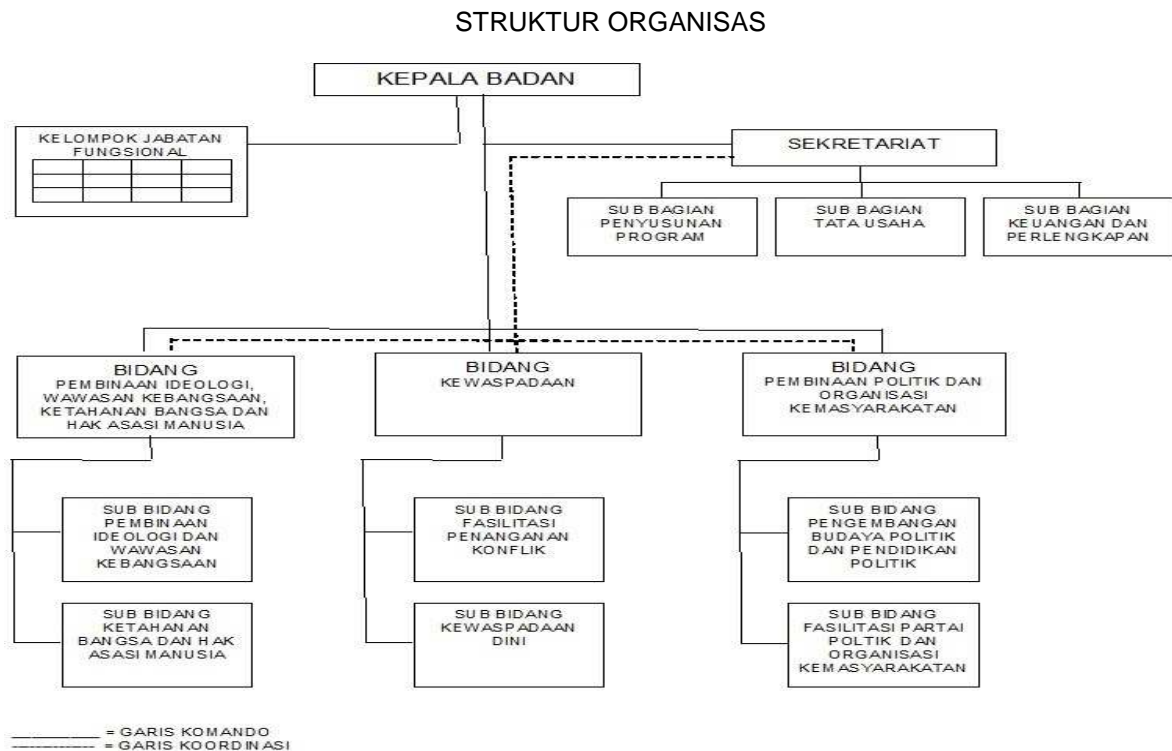
1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-



- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3.2. Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya OPD

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital



didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep berdasarkan kulaifikasi pendidikan :

Tabel 2.2.1
Kualifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-2	5	1	5
2	S-1	9	2	9
3	D-3	-	-	1
4	SMA	20	2	20
5	SMP	1	-	1
JUMLAH		35	5	35

Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dengan dibantu oleh tenaga PHL/Outsourcing sebanyak 42 orang.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok an fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung dan Fasilitas

Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep terletak di jalan Trunojoyo Nomor 141 Sumenep dan merupakan aset gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Adapun gedung ini terbagi atas :

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretariat
- e. Ruang Bidang
- f. Ruang Rapat
- g. Areal parker



- h. Mushola
- i. Kamar Mandi
- j. Gudang

2. Peralatan dan kendaraan operasional

Tabel 2.2.2
Peralatan dan kendaraan operasional

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil Dinas	4	Unit	1 Baik, 3 RB
2	Sepeda Motor	16	Unit	4 Baik, 3 RB, 9 RT
3	Lemari	16	Unit	16 Baik
4	Kulkas	6	Unit	6 Baik
6	Filling Kabinet	5	Unit	5 RB
7	Brankas	1	Unit	1 Baik
8	Meja	17	Unit	17 Baik
9	Kursi	143	Unit	54 Baik, 71 RB, 18 RT
10	AC	10	Unit	5 Baik, 5 RB
11	TV	7	Unit	4 Baik, 3 RB
12	UPS	5	Unit	5 RB
13	Komputer	11	Unit	6 Baik, 5 RB
14	Printer	12	Unit	8 Baik, 4 RB
15	Laptop	4	Unit	2 Baik, 2 RB
16	Kamera	5	Unit	2 Baik, 3 RB
17	Handytalky	5	Unit	5 Baik
18	Screen proyektor	1	Unit	1 Baik
19	LCD Proyektor	1	Unit	1 Baik
20	Faximili	1	Unit	1 Baik

Dengan sarana operasional dan pendukung yang kurang memadai merupakan kelemahan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep setiap tahun melakukan pengadaan perlengkapan perkantoran untuk mengganti yang telah rusak berat (RB) atau bahkan rusak total (RT) dengan ketersediaan anggaran yang ada.



1.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah “SUPER MANTAP”

yaitu : ”Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 5

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar



Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

Persentase Jumlah Konflik

Sasaran 1

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Indikator Sasaran :

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social

1.5. Isu-isu Strategis

Meperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Sumenep, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dimasa 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Mengejalanya erosi nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.
3. Konflik sosial, bencana, rasa aman, ketertiban masyarakat, penegakan hukum/HAM, terorisme, narkoba, proxy war, dan isu SARA merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi, forum fasilitasi, forum silaturahmi, rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya



masyarakat Sumenep yang makin sejahtera sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 5

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

Persentase Jumlah Konflik

Sasaran 1

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Indikator Sasaran :

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social

Tabel 1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatkan toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari kesadaran nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	92%



Tabel 2

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Persentase Konflik Sosial	92%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Prosentase Penurunan Penyakit Masyarakat	29,55%	Sistem Deteksi Dini Dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	25	500.000.000,00
						Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah	Jumlah pertemuan Forkompimda	12 X Rapat/ Pertemuan	120.036.000,00
Meningkatnya Pendidikan Politik dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	-	Program ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan HAM	Persentase pengembangan wawasan Kebangsaan	100%	Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	3 Ormas	112.700.000,00
						Pembentukan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya bangsa	3 Ormas	36.937.000,00
						Ketahanan bangsa dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) terhadap tokoh masyarakat	3 Ormas	47.210.000,00
			Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan partai politik Melalui Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis	Jumlah Masy/Ormas/Orpol yg mengikuti pendidikan politik	3 Ormas	57.416.000,00
						Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah pembinaan terhadap ormas dan LSM	3 Ormas	102.990.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang merupakan *Entry Point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Dalam Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah secara menyeluruh akibat dari penggunaan sumberdaya yang ada terhadap hasil (outcomes) maupun manfaat (benefits) yang dirasakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui metode pengumpulan data dan pengolahan data guna menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada estimasi yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, kegiatan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017		
		TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	92%	92%	100%
Meningkatnya Pendidikan Politik dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	-	-	-

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	
			TAHUN 2016	TAHUN 2017
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	92%	91%	92%
Meningkatnya Pendidikan Politik dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	-	-	-



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	95%	92%	96,84%
Meningkatnya Pendidikan Politik dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	6%	-	-

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis “Meningkatnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik, dengan indikator kinerja Prosentase Penanganan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan target kinerja tahun 2017 sebesar 92% terialisasi sebesar 92% dari jumlah 33 demo yang ditangani, maka capaian kinerja tahun 2017 ditangani sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan dari target kinerja 91% terialisasi sebesar 91% dengan capaian kinerja sebesar 100% perbandingan dari kejadian jumlah konflik sosial sebesar 1%, hal ini disebabkan meningkatnya kualitas nilai-nilai kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :

COST PER-OUTCOME:

1. Alokasi Sasaran Pembangunan

Tabel 5.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	1.879.699.800	100%



2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 5.2

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Bangsa dan Hak Asasi Manusia	Persentase pengembangan wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	506.667.300	331.237.300	65,38%
Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
Terfasilitasinya penanganan konflik dan pengawasan	Persentase penurunan Penyakit Masyarakat	29,55%	29,55%	100%	1.107.525.000	1.064.525.000	96,12%
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)							
Terbinanya politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik	100%	100%	100%	265.507.500	233.532.500	87,96%
Program pendidikan politik masyarakat							

3. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 5.3

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Bangsa dan Hak Asasi Manusia	Persentase pengembangan wawasan Kebangsaan	100%	65,38%	34,62%
Terfasilitasinya penanganan konflik dan pengawasan	Persentase penurunan Penyakit Masyarakat	100%	96,12%	3,88%
Terbinanya politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik	100%	87,96%	12,04%



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

1) Sasaran Program Meningkatnya Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Bangsa dan Hak Asasi Manusia, dengan indikator program Persentase pengembangan wawasan Kebangsaan sangat berhasil capaian kinerja sebesar 100% penyerapan anggaran sebesar 81,65% efisiensi anggaran sebesar 34,62%, hal ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini melaksanakan sosialisasi 8 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Ganding pada tanggal 11 April 2017;
- Kecamatan Bluto pada tanggal 18 Mei 2017;
- Kecamatan Batuan pada tanggal 13 Juli 2017;
- Kecamatan Dungkek pada tanggal 26 September 2017;
- Kecamatan Gapura pada tanggal 21 Nopember 2017;
- Kecamatan Pragaan pada tanggal 23 Nopember 2017;
- Kecamatan Gapura pada tanggal 19 Desember 2017;
- Kecamatan Saronggi pada tanggal 21 Desember 2017;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

b. Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Kegiatan Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa ini melaksanakan sosialisasi 6 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Rubaru pada tanggal 04 Mei 2017;
- Kecamatan Lenteng pada tanggal 18 Juli 2017;
- Kecamatan Bluto pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Kecamatan Lenteng pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 07 Desember 2017;
- Kecamatan Bluto pada tanggal 12 Desember 2017;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.



- c. Penguatan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi
Kegiatan Penguatan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi ini melaksanakan sosialisasi 1 kali di Hotel Utami pada Tanggal 28 Nopember 2017.
Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.
 - d. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ini melaksanakan sosialisasi 2 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :
 - Kecamatan Ganding pada tanggal 09 Nopember 2017
 - Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 19 Oktober 2017Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.
- 2) Sasaran Program Terfasilitasinya penanganan konflik dan pengawasan, dengan indikator program Persentase penurunan Penyakit Masyarakat sangat berhasil capaian kinerja sebesar 100% penyerapan anggaran sebesar 94,19% efisiensi anggaran sebesar 3,88%, hal ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA
Kegiatan Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA adalah Komite Inteligent Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Stabilitas Keamanan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Suimenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :
 - Wakapolres Sumenep;
 - Kasat Intelkam Polres Sumenep;
 - Unsur Intelkam Polres Sumenep;
 - Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep;
 - Unsur Intel Kodim 0827 Sumenep;



- Petugas BIN Wilayah Sumenep;
- Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Unsur Bea dan Cukai Kecamatan Kalianget;
- Kepala Kantor Satpol PP Kab. Sumenep;

b. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat ini melaksanakan sosialisasi 4 X di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Kalianget pada tanggal 19 Mei 2017;
- Kecamatan Gapura pada tanggal 20 Juli 2017;
- Kecamatan Ganding pada tanggal 24 Agustus 2017;
- Kecamatan Manding pada tanggal 26 Oktober 2017;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

c. Peningkatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah

Kegiatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Permasalahan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Kapolres Sumenep;
- Kodim 0827 Sumenep;
- Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;
- Ketua DPRD Sumenep;
- Bapak Sekretaris Daerah Kab. Sumenep;
- Bapak Asisten I,II,III Kab/ Sumenep;
- Instansi Terkait Pemerintah Daerah Kab. Sumenep;



3) Sasaran Program Terbinanya politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator program Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik sangat berhasil capaian kinerja sebesar 100% penyerapan anggaran sebesar 87,96% efisiensi anggaran sebesar 12,04%, hal ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. koordinasi forum-forum diskusi politik

Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik ini melaksanakan sosialisasi 2 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Manding pada tanggal 26 April 2017;
- Kecamatan Lenteng pada tanggal 10 Agustus 2017;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

b. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Di dalam Kegiatan ini melakukan Pemberian Bantuan Keuangan kepada 11 (sebelas) Partai Politik, diantaranya :

- Partai Demokrat;
- Partai Gerindra;
- Partai Golkar;
- Partai PPP;
- Partai PKB;
- Partai PBB;
- Partai PDIP;
- Partai Nasdem;
- Partai PKS;
- Partai PAN;
- Partai Hanura;

c. Monitoring dan Evaluasi Organisasi Masyarakat dan LSM

Di dalam Kegiatan ini melakukan Perjalanan Dinas memonitoring dan mengevaluasi tentang keberadaan Organisasi dan LSM sebanyak 86 yang sudah terdaftar di lingkungan Pemerintah Kabuapten Sumenep;



d. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM

Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM ini melaksanakan sosialisasi 6 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Saronggi pada tanggal 26 Mei 2017;
- Kecamatan Rubaru pada tanggal 25 Juli 2017;
- Kecamatan Kalianget pada tanggal 19 September 2017
- Kecamatan Bluto pada tanggal 13 Nopember 2017
- Kecamatan Ganding pada tanggal 14 Nopember 2017
- Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 14 Desember 2017

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan ^{Kultur} politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis ini melaksanakan sosialisasi 3 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Dasuk pada tanggal 27 Mei 2017;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 08 Agustus 2017;
- Kecamatan Ambunten pada tanggal 18 September 2017

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

B. Anggaran

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep adalah **Rp. 2.370.699.035,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)** dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016.



Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel : B.1

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (SISA)	%
BELANJA LANGSUNG	2.370.699.035,00	2.043.011.524,00	-327.687.511,00	86,18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.032.635,00	312.880.124,00	-65.152.511,00	82,77
Penyediaan jasa surat menyurat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.600.000,00	34.232.673,00	-11.367.327,00	75,07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.200.000,00	31.345.901,00	-854.099,00	97,35
Penyediaan jasa kebersihan kantor	79.879.800,00	77.141.550,00	-2.738.250,00	96,57
Penyediaan alat tulis kantor	18.658.800,00	18.658.800,00	0,00	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.320.000,00	9.672.000,00	-648.000,00	93,72
Penyediaan makanan dan minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	121.000.000,00	82.461.000,00	-38.539.000,00	68,15
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.600.000,00	3.705.000,00	-1.895.000,00	66,16
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	14.994.035,00	11.505.000,00	-3.489.035,00	76,73
Pameran Pembangunan	25.000.000,00	19.378.200,00	-5.621.800,00	77,51
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100.966.600,00	100.486.600,00	-480.000,00	99,52
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.154.600,00	26.154.600,00	0,00	100,00
Pengadaan mebeleur	26.132.000,00	26.132.000,00	0,00	100,00
Pengadaan Komputer	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000,00	7.520.000,00	-480.000,00	94,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.000.000,00	350.000,00	-11.650.000,00	2,92



URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (SISA)	%
Pendidikan dan pelatihan formal	12.000.000,00	350.000,00	-11.650.000,00	2,92
Program pengembangan wawasan kebangsaan	459.457.300,00	298.327.300,00	-161.130.000,00	64,93
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	212.700.000,00	141.950.000,00	-70.750.000,00	66,74
Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	184.819.900,00	122.739.900,00	-62.080.000,00	66,41
Penguatan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbelas Negara dan Berkonstitusi	61.937.400,00	33.637.400,00	-28.300.000,00	54,31
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	534.699.000,00	513.399.000,00	-21.300.000,00	96,02
Peningkatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah	487.489.000,00	480.489.000,00	-7.000.000,00	98,56
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	47.210.000,00	32.910.000,00	-14.300.000,00	69,71
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	620.036.000,00	584.036.000,00	-36.000.000,00	94,19
Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA	120.036.000,00	84.036.000,00	-36.000.000,00	70,01
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
Program pendidikan politik masyarakat	265.507.500,00	233.532.500,00	-31.975.000,00	87,96
koordinasi forum-forum diskusi politik	76.984.000,00	50.184.000,00	-26.800.000,00	65,19
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	17.740.500,00	17.740.500,00	0,00	100,00
Monitoring dan Evaluasi Organisasi Masyarakat dan LSM	10.377.000,00	5.202.000,00	-5.175.000,00	50,13
Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM	102.990.000,00	102.990.000,00	0,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis	57.416.000,00	57.416.000,00	0,00	100,00



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.